

ABSTRAK

Perusahaan pinjaman virtual atau *fintech P2P lending* hadir sebagai lembaga jasa keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Artinya, P2P lending disediakan melalui sistem online yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Penyelenggara berhak untuk menagihkan utang debitur berdasarkan perjanjian penyelenggaraan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Namun, penagihan yang dilakukan melalui karyawannya (*desk collector*) dilakukan dengan ancaman, asusila dan pornografi yang merupakan tindak pidana. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi *virtual loan* dalam penagihan pinjaman *online* dengan ancaman, asusila dan pornografi. Cara penagihan yang berindikasi tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK, tetapi juga yang ilegal. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE dan ppidanaannya adalah pidana denda. Penyelenggara aplikasi *virtual loan* ilegal, melalui pengurusnya turut membantu perbuatan tersebut sebagai *medeplichtige* karena menyediakan sarana yaitu akses data pribadi debitur berupa informasi elektronik yang digunakan untuk mengancam.

Kata kunci: *Ancaman, Asusila, Pinjaman, Pornografi.*

ABSTRACT

Virtual loan companies or fintech P2P lending present as financial services institutions by utilizing technological advances. This means that P2P lending services are provided via online systems that facilitates meetings between lenders (creditors) and borrowers (debtors) for the purpose of making a loan agreement. The provider owns a right to collect debtor's debt in accordance with agreement between providers and lenders. However, the method of collecting money loans through his employees (desk collector) commit threats, immorality and pornography which is a criminal act. So this research aims to determine the criminal act and criminal responsibility of virtual loan companies in collecting loans with threats, immorality and pornography. Collections that imply a criminal act are not only carried out by legal entities registered with the OJK, but also those are illegal. This thesis used juridical-normative legal research by using few approaches, namely the statue, conceptual and case approach. The results show that criminal acts committed by virtual loan companies may be subject to Article 27 paragraph (1) or paragraph (4) of the ITE Law and the punishment is a fine. Illegal virtual loan providers, through their management, participated in this act as medeplichtige because they provided a means of accessing personal data in the form of electronic information used to threaten.

Keyword: Threat, Immorality, Loan, Pornography.